

SEJARAH DI ANTARA KELAMPAUAN, KEKINIAN, DAN KEAKANAN

Fadly Rahman

Departemen Sejarah dan Filologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
fadly.rahman@unpad.ac.id

Abstrak

Sejak lama sejarah kerap diadaptasi untuk berbagai kepentingan. Tujuannya tidak lain, dengan merekonstruksi masa lalu melalui beragam media (seperti film, novel, dan komik) diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman, bahwa: masa lalu selalu aktual. Dalam proses mengadaptasikan sejarah, kepakaran seorang sejarawan sejatinya amat diperlukan. Namun demikian, berbagai pengakuan terhadap sejarawan sebagai sebuah profesi nyatanya telah mengalami pergeseran. Perkembangan pengetahuan yang berjalan-iring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi disadari atau tidak justru berpeluang mereduksi makna asasi dari peran sejarawan itu sendiri. Artikel ini mencoba merumuskan kembali strategi dan metode akademik melalui pewacanaan sejarah publik dan sejarah interdisipliner sebagai upaya menyiapkan para sejarawan bukan hanya profesionalitasnya, melainkan vokasionalitasnya agar mereka memiliki keahlian terapan yang dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan praktis saat ini.

Kata kunci: sejarawan; profesi; vokasi; sejarah publik; sejarah interdisipliner

Abstract

For a long time, history has often been adapted for various purposes and reconstructed through various media (such as films, novels, and comics). The adaptation of history aims to foster the understanding that the past is always actual. The process of adapting history necessitates the expertise of a true historian. However, various acknowledgment of historians as a profession has experienced a shift. The development of knowledge that goes hand in hand with the rapid development of information technology is likely to reduce historians' roles fundamentally. This article attempts to reformulate academic strategies and methods through public history and interdisciplinary history discourse to prepare historians in terms of their professionalism and vocationality to have the applied expertise required in various practical needs today.

Keywords: *historian; profession; vocational; public history; interdisciplinary history*

I. PENDAHULUAN

Pada 10 Oktober 2018 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengadakan audiensi dengan para pejabat eselon, para pimpinan perguruan tinggi nasional (PTN), dan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Presiden menyatakan: "Sekali lagi, saya juga tidak mau mendengar PT tidak mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti yang baru. Sudah 40 tahun, 50 tahun, fakultas, prodi, itu-itu saja." (Ihsanudin, 2018).

Pernyataan itu terkait dengan maksud presiden yang menghendaki supaya perguruan tinggi (PT) seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Salah satu caranya adalah dengan membuka fakultas-fakultas baru yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pernyataan “fakultas dan program studi yang sudah usang” tentu memunculkan tanda tanya: fakultas dan program studi apa yang dimaksudkan oleh presiden? Jika konteks “usang” itu terkait dengan fakultas dan program studi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, maka “kebutuhan” macam apa yang harus dipenuhi PT? Tentu jika konteks fakultas dan prodi “baru” untuk menggantikan yang “usang” dikaitkan dengan tren Revolusi 4.0, maka tampaknya fakultas dan prodi sebagaimana dimaksudkan presiden adalah yang dapat mencetak tenaga kerja dengan keterampilan khusus sesuai kebutuhan industri.

Apa yang dimaksudkan presiden tentu mencemaskan bagi keberlanjutan program-program studi yang ia kategorikan “usang”. Jika dikaitkan dengan kebutuhan industri yang menghendaki keterampilan khusus, maka ini tentu menjadi peringatan serius bagi disiplin ilmu humaniora. Orientasi dari sistem pendidikan yang berorientasi pasar sangat rawan mengancam eksistensi ilmu-ilmu humaniora. Salah satu buktinya terjadi di Jepang pada 2015 ketika Kementerian Pendidikan di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe sempat memerintahkan universitas-universitas di sana menutup fakultas-fakultas ilmu sosial dan humaniora. Dari 60 universitas nasional, 26 di antaranya sempat mengkonfirmasi akan menutup atau menimbang kembali perintah pemerintah (Grove, 2015). Perintah ini mulanya dimaksudkan untuk mempromosikan lebih banyak pendidikan kejuruan (*vocational*) “yang lebih baik” dalam mengantisipasi “kebutuhan-kebutuhan masyarakat”. Setelah mendapat kritik dari para pakar ilmu humaniora di dalam dan luar negeri, pemerintah Jepang akhirnya mempertimbangkan kembali niatnya. Salah satu komentar datang dari Kepala Divisi Program Studi Humaniora Universitas Oxford, Karen O’Brien yang menyatakan secara filosofis urgensi ilmu humaniora:

“Humanities is fundamental to understanding in a profound way who we are, how we have come to be who we are, and to think deeply about how we address the practical, ethical, and historical problems in the modern age... Without a scholarly humanities perspective on all of those issues, we run the risk of going into accelerating future and technologies ... without that deeper understanding and awareness” (Aoki, 2017).

Dari pernyataan O’Brien dapat dikatakan bahwa salah satu manfaat humaniora adalah menumbuhkan kesadaran historis sebagai langkah untuk menghadapi masa depan. Adapun ilmu sejarah sebagai salah satu dari rumpun humaniora secara khusus bertujuan mengaktualisasikan masa lalu bukan hanya untuk kepentingan ideologis dan politik –sebagaimana selama ini kerap dipandang dan dimanfaatkan demikian, melainkan untuk kebutuhan praktis berbagai aspek.

Di Indonesia, perbincangan perihal sejarah untuk kebutuhan praktis ini mencetuskan wacana dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi profesi sejarawan. Wacana ini digulirkan pada 2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Kebudayaan (Hartik, 2016). Sertifikasi ini ditujukan agar sejarawan memiliki lisensi dan legalitas profesi sehingga pemikiran dan karyanya dapat diakui berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.

Jika menelaah permasalahan di atas, sudah sejauh manakah ilmu sejarah digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis berbagai aspek di Indonesia?

Seberapa pentingkah kedudukan, peran, dan perspektif keilmuan sejarawan dalam kehidupan publik? Bagaimana relevansi eksistensi program studi sejarah sekarang ini dalam menghasilkan sejarawan? Dan jika dikaitkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis, apakah konteks dari upaya sertifikasi sejarawan hanya sekadar cukup sebagai profesi atau memerlukan keterampilan vokasional?

Berpijak pada pertanyaan-pertanyaan itu, artikel ini berupaya mengevaluasi makna dari sejarawan pada masa sekarang, baik dalam konteks profesi maupun vokasi, melalui pewacanaan sejarah interdisipliner (*interdisciplinary history*) dan sejarah publik (*public history*). Dengan mewacanakan kedua tren studi sejarah itu akan dilihat bagaimana sejatinya lulusan sejarah diakui keterampilan-keterampilannya untuk menjawab berbagai kebutuhan praktis.

II. METODE PENELITIAN

Selama ini persoalan mengenai keluaran/lulusan Program Studi/Jurusan Sejarah lebih kerap bertumpu ke konteks jenis pekerjaan yang ditempuh oleh para lulusannya. Namun, jika dikaitkan dengan “bekal” ilmu sejarah yang diperoleh oleh para lulusan selama menjalani masa perkuliahan, lantas apa saja jenis pekerjaan dan berapa persen lulusan yang menggunakan “bekal” keilmuannya untuk dipraktikkan dalam bidang pekerjaannya? Pertanyaan ini tentu sulit dijawab secara komprehensif jika tidak didukung dengan *database* semisal *tracer study*.

Kuntowijoyo dalam *Pengantar Ilmu Sejarah* (1999: 2 – 7) menyinggung beberapa profesi di Indonesia yang menggunakan kata “sejarah”, di antaranya: guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah, pelaku sejarah dan saksi sejarah (yang menulis sejarah), serta peneliti dan penulis sejarah. Untuk yang disebut terakhir, Kuntowijoyo menilai peneliti dan penulis sejarah adalah mereka yang dihasilkan melalui pelatihan/pendidikan di jurusan sejarah di lembaga perguruan tinggi. Meski ditujukan untuk mencetak peneliti dan penulis sejarah, namun ia menyinggung perihai ketidak-merataan “bakat” masing-masing mahasiswa untuk menempuh studi di jurusan sejarah. Persoalan “bakat” itu kemudian dikaitkan oleh Kuntowijoyo dengan kualitas tugas akhir mahasiswa yang diutarakannya sebagai berikut:

“Sangat disayangkan bahwa hasil latihan yang berupa skripsi S1, S2, dan S3 kebanyakan tidak laik terbit, pada umumnya dari segi pemasaran, sehingga masyarakat luas tidak ikut menikmati hasil yang mungkin secara tidak terasa mereka turut menanggung biayanya. Memang, skripsi-skripsi itu tidak ditulis untuk memenuhi selera pasar, tetapi semata-mata dari pertimbangan akademis” (Kuntowijoyo, 1999: 7).

Pernyataan Kuntowijoyo itu menyiratkan bahwa antara “bekal” (ilmu sejarah) dengan “bakat” para lulusan sejarah dengan kata lain tidak selalu linier dalam menentukan kualitas lulusan. Namun dari hal itu setidaknya dapat dipahami bahwa ilmu sejarah sebagai modal profesi sebenarnya menunjukkan konsep lama warisan dari pemikiran Leopold von Ranke (1795 – 1886). Sejarawan Jerman inilah yang mula-mula menggagas sejarah sebagai sebuah disiplin yang memiliki sistem nilai tersendiri (Arnold, 2000: 55; Paul, 2016: 5). Pada abad ke-19, Ranke mengembangkan sejarah sebagai sebuah profesi dengan membangun tradisi seminar di mana para muridnya

ditempa belajar untuk mempraktikkan keilmuannya dengan menggunakan sumber-sumber primer. Hingga pertengahan abad ke-19, ilmu sejarah yang diidealkan Ranke merupakan standar keilmuan yang mulai banyak dianut oleh komunitas sejarawan di Eropa. Ranke mengidealkan penulisan sejarah harus didasarkan pada penyelidikan kritis terhadap penggunaan sumber-sumber primer dalam menemukan fakta. Masalahnya, sumber-sumber primer yang diidealkan oleh Ranke lebih mewakili kepentingan penguasa, negara, bangsa, dan militer. Maka dari itu, prinsip metode sejarah kritis yang dikonsepsikan Ranke sangat politis.

Apa yang dikonsepsikan Ranke nyatanya menjadikan sejarah semakin intim dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Hal inilah yang memunculkan reaksi dari kalangan sejarawan yang mengkritisi relevansi sejarah sebagai sebuah profesi. Di kalangan sejarawan Barat pada dasawarsa 2000-an mengemuka diskursus pembelajaran sejarah yang menekankan pada aspek vokasi. Sejarawan Graeme Davison (2006: 4) dalam *History as a Vocation*, lebih mengarahkan ilmu sejarah sebagai “vokasi” dan juga “panggilan”. Kedua istilah ini menurut Davison mencerminkan kesadaran sejarah yang berlandaskan pada komitmen total dari para cendekiawan, seniman, dan warga negara. Sejarah sebagai sebuah vokasi di mata Davison hendaknya dapat dijadikan semacam “perhatian bersama” (*kindred preoccupations*).

Wacana yang diusung Davison sangat berkait dengan spirit sejarawan pada era milenial yang menginginkan sejarah dapat diakses oleh publik. Untuk mewujudkannya, *Public History* menjadi konsep yang dipraktikkan dalam pendidikan ilmu sejarah baik di lingkungan akademik maupun publik. Faye Sayer (2015) selaku pengusung konsepnya menilai bahwa melalui praktik sejarah publik, keterampilan para sejarawan diperlukan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, seperti pekerja museum, arsiparis, aparat pemerintah, komunitas sejarah, serta media. Dengan begini, sejarah dapat diakses oleh khalayak luas melalui beragam cara.

Apa yang dituju dari studi sejarah publik merupakan pengembangan dari konsep interdisipliner (*interdisciplinary*) yang berkembang sepanjang abad ke-20. Menurut Julie Thompson Klein dalam *Creating Interdisciplinary Campus Culture* (2010), interdisipliner adalah konsep studi yang melibatkan dua atau lebih disiplin akademik dalam satu aktivitas penelitian. Meskipun interdisipliner adalah istilah yang mengemuka pada abad ke-20, namun secara anteseden, konsepnya telah berakar sejak masa Yunani Kuno. Klein membuktikan bahwa akar dari konsep interdisipliner pada masa kuno terletak pada sejumlah gagasan yang beresonansi dengan wacana modern, meliputi gagasan-gagasan ilmu yang bersatu, pengetahuan umum, sintesis, dan integrasi pengetahuan. Suatu disiplin ilmu seperti sejarah dapat dengan mudah didefinisikan sebagai bidang yang relatif mandiri serta memiliki komunitas ahlinya sendiri.

Moti Nissani (1995 & 1997), salah seorang pengusung wacana interdisipliner, menilai bahwa interdisipliner sebagai sebuah konsep keilmuan paling baik jika dilihat sebagai upaya untuk menyatukan komponen-komponen khas dari dua atau lebih disiplin ilmu. Dalam wacana akademik, interdisipliner berlaku dalam empat bidang, yaitu: pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan teori. Konsep interdisipliner dalam penelitian dan pendidikan setidaknya dapat diperingkat dengan menimbang

empat variabel, yaitu: jumlah disiplin ilmu yang terlibat, jarak antardisiplin, kebaruan dari kombinasi tertentu, dan tingkat integrasi mereka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memaknai Ulang Profesi Sejarawan

Ketika mendengar kata “sejarawan”, biasanya publik akan mengidentifikasinya sebagai sebuah profesi yang mengurus, menulis, atau berbicara tentang masa lalu. Di mata publik, sejarawan sendiri bukanlah profesi yang populer. Tidak banyak dari publik –bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun– yang mengetahui bahwa untuk menjadi sejarawan ada proses akademik yang selama bertahun-tahun dijalani seseorang di jurusan sejarah di lembaga perguruan tinggi. Ketika mengetahuinya, reaksinya pun beragam, mulai dari antusias ingin mengetahui lebih jauh hingga meremehkan dan membandingkannya dengan jurusan yang dinilai lebih populer.

Kondisi itu seakan menjadi hal yang dianggap lumrah. Akan tetapi ketika dilumrahi terus-menerus, ada bahaya yang rawan mengancam publik itu sendiri. Bahaya itu datang dari siapa saja yang bicara dan menulis tentang sejarah tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Lebih celaka lagi ketika publik menelan begitu saja tanpa mengkonfirmasi fakta-fakta sejarahnya. Contoh kasus yang masih cukup aktual adalah pernyataan Ridwan Saidi ketika mencetuskan ke media massa bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif. Bukan hanya meresahkan, Saidi juga dinilai melecehkan hasil penelitian sejarah dan arkeologi seperti dilakukan George Cœdès dan Slamet Muljana yang telah bersusah-payah meneliti jejak-jejak Sriwijaya. Namun, ketika menanggapi kritik dan hujatan para sejarawan profesional, pernyataan Saidi sungguh mengejutkan: “... Ini kan masalah *keilmuan*. Saya tidak bicara di luar itu. Ini kan masalah *ilmiah*, kalau masalah *ilmiah* dipidanakan itu saya enggak ngerti nganut sistem hukum apa” (CNN Indonesia, 2019).

Dari teks “keilmuan” dan “ilmiah” yang saya cetak tebal menandakan bahwa siapa saja dapat mengklaim dirinya punya landasan keilmuan dan ilmiah ketika membahas persoalan sejarah. Pada situasi seperti ini, figur publik yang kerap tampil di layar televisi dan diliput media seperti Saidi, berpeluang berceles apapun tentang sejarah. Lebih pahit lagi jika publik menganggap celotehannya sebagai fakta. Tanggapan dan kritik dari para sejarawan profesional –yang tentu saja tidak sepopulis Saidi– ibarat debu yang lekas hilang diterbangkan angin.

Pada era ketika teknologi informasi berkembang pesat, kebutuhan publik terhadap informasi cenderung ingin selalu serba cepat dan instan. Di tengah kondisi seperti ini, arti sebuah kepakaran seperti halnya sejarawan pun menjadi tidak ada artinya. Tom Nichols (2019: 64) mengatakan bahwa kepakaran berpotensi mati ketika sebagian besar awam tidak pernah diajarkan, atau mereka telah lupa, “dasar metode ilmiah”. Sebelum kasus Saidi, kasus *pseudo history* seperti buku *Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman* karya Fahmi Basya (2012) menunjukkan bahwa publik semakin terbiasa menggunakan kata “bukti”. Kata ini digunakan begitu bebas. Dan dalam kasus penyemuan sejarah sebagaimana disinggung di atas, “bukti”, ujar Nichols (2019: 64), kadang diartikan sebagai “hal yang saya anggap benar”, bukan seharusnya sebagai “hal yang telah teruji sebagai fakta berdasarkan peraturan yang sudah disepakati”.

Sejarah semu berpotensi berkembang biak, dan ketika publik dibuatnya percaya, maka di mana dan ke mana saja selama ini sejarawan profesional berperan hadir dalam menerangi publik dengan pengetahuan-pengetahuan sejarah yang dapat dipertanggung-jawabkan keilmiahannya? Sejarawan profesional sendiri umumnya dibentuk/dihasilkan melalui proses akademik yang ditempuh di lembaga-lembaga perguruan tinggi. Akan tetapi masalahnya, kebanyakan dari kerja sejarawan akademik selama ini adalah merasa terlalu nyaman dengan lingkungannya –yang oleh pakar sejarah publik, Faye Sayer (2015), disindir sebagai “*natural habitat*”-nya. Hal ini menjadikan aktivitas mereka dalam mengajar, meneliti, dan mempublikasikan karya-karyanya hanya bertengger di menara gading¹ alias bersirkulasi di lingkungannya saja sehingga tidak teruji kualitasnya di mata publik. Sejarawan akademisi pada akhirnya absen berinteraksi dengan publik.

Absennya peran sejarawan akademik dari publik, praktis menghasilkan banyak lulusannya yang tidak menerapkan keilmuannya untuk publik. Sayer (2015) menilai kondisi ini seharusnya mendorong program-program studi ilmu sejarah lebih ditekankan pada konteks kejuruan (*vocational*) demi menyiapkan para siswanya memiliki keahlian untuk masa depan terkait dengan profesi pekerjaan mereka. Langkah ini dimulai dari sistem akademik yang mengarahkan keahlian para pengajarnya dengan memberikan pengaruh terhadap praktik-praktik pedagogisnya. Metode pengajaran sejarah di program-program studi sejarah yang selama ini terkesan monoton serta tidak mengikuti perkembangan mutakhir pemikiran sejarah semestinya perlu diubah paradigma keilmuannya untuk mengubah kesan usang yang melekat terhadap ilmu sejarah.

Secara pedagogik, kelemahan strategi pengajaran sejarah Indonesia mengakar sejak di tingkat sekolah. Menurut Haryono (1995: 12) pendidikan sejarah di sekolah lebih berkutat pada pendekatan *chronicle* dan siswa cenderung dituntut untuk menghafal peristiwa. Dalam belajar sejarah, siswa tidak dibiasakan untuk mengartikan peristiwa dalam memahami dinamika dari suatu perubahan. Dengan kata lain, ini menandakan bahwa dengan belajar sejarah bukan serta merta siswa mampu untuk berpikir historis. Jika Sam Wineburg (2006) menyatakan bahwa mengajarkan masa lalu adalah untuk memetakan masa depan, maka di Indonesia kebanyakan siswa masih berpikir bahwa sejarah adalah pelajaran tentang masa lalu. Kuntowijoyo (1995: 73) menilai kenyataan dari kondisi pembelajaran sejarah di Indonesia yang jauh dari harapan untuk memungkinkan siswa melihat relevansi dari masa lalu dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Ini semakin menandakan bahwa pendidikan sejarah di Indonesia masih begitu ahistoris dalam mengajarkan bahwa masa lalu akan selalu relevan untuk saat ini dan nanti. Padahal E.H. Carr (2001: 62) sudah mengingatkan, bahwa: “*To learn about the present in the light of the past means also to learn about the past in the light of the present. The function of history is to promote a profounder understanding of both past and present through the interrelation between them*”

¹ Perihal ini saya mendapat pencerahan dari artikel Benedict Anderson “Public Intellectual or a Tribute to Books” (2017) mengenai absennya peran lembaga-lembaga perguruan tinggi di beberapa negara Asia Tenggara yang pernah dikuasai rezim oligarki (meliputi Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia) dalam menghasilkan intelektual publik.

Permasalahan di atas salah satunya terletak pada soal kurikulum. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum dan mata pelajaran sejarah telah beberapa kali mengalami perubahan. Meskipun demikian, sekalipun materi-materi pelajaran sejarah dalam kurikulum kerap menuai kritik dari kalangan masyarakat dan juga pemerhati sejarah, namun pengembangan dan implimentasinya kerap digunakan untuk mendukung kepentingan kekuasaan (Abdullah, 2001). Hal ini pada akhirnya memengaruhi masalah profesionalisme para guru di sekolah yang mengajar sejarah itu sendiri. Ada kesan yang berlaku di kalangan pemangku kebijakan di sekolah, bahwa dalam pengajaran sejarah di sekolah cenderung tidak begitu penting mengedepankan dan memperhatikan masalah keprofesian. Tidak jarang tugas mengajarkan sejarah diberikan kepada guru yang bukan profesinya. Akibatnya, guru hanya mengajarkan sejarah dengan melakukan pengulangan materi yang terkandung di dalam buku (Kartodirdjo, 2000: 36).

Sejarah sejatinya tidak pernah usang. Adapun yang usang adalah pemikiran sejarah yang tidak berkembang –bandingkan dengan pemikiran Annales di Prancis². Sejak Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama diselenggarakan pada 1957,³ Indonesia sedianya sudah memiliki pijakan pemikiran historiografi yang ideal untuk dikembangkan pada masa-masa setelahnya. Akan tetapi selama tiga puluh tahun di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, tren pemikiran historiografi cenderung berkembang klandestin di bawah opresi rezim politik sebagaimana dibuktikan dalam penelitian McRegor (2008). Sejarah menjadi begitu politis ketika dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim politik. Ini masalah klise yang dihadapi dunia kesejarahan, betapa hubungan sejarah dengan politik mencirikan keduanya ibarat saudara kandung yang sulit dipisahkan. Maka dari itu, disadari atau tidak, belajar sejarah adalah sebetulnya kegiatan politis. Rekonstruksi masa lalu adalah bagian dari masa kini. Hal ini sudah bisa menyiratkan bahwa rekonstruksi sejarah bertendensi politis (Fulbrook, 2002: 72); atau dalam pernyataan Bambang Purwanto (2006: xiv): “sejarah adalah sejarah politis.” Itulah mengapa sejarah kerap disukai untuk dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kondisi ini menjadikan sejarah semakin berjarak dari publik⁴ dan pandangan seperti inilah yang seharusnya didekonstruksi.

² Sejak awal abad ke-20 pemikiran Annales berkembang dalam tiga tahap. *Pertama*, generasi sejarah ekonomi dan sosial sejak masa Bloch dan Febvre (pra 1945) hingga Braudel dan Labrouse (hingga akhir 1960-an); *Kedua*, generasi sejarah mentalitas, sejak akhir 1960-an hingga awal 1980-an; dan *Ketiga*, generasi sejarawan yang sejak 1980-an mengkritik dan mempertanyakan eksplanasi sejarah ekonomi dan sosial serta metodologi kuantitatif yang digunakan oleh sejarawan generasi sebelumnya (Delacroix, Dosse & Garcia, 2007: 27 – 29; lihat juga Munslow, 2000: 29 – 31).

³ Mengenai pemikiran sejarah dalam Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama ini lihat Soedjatmoko (2007).

⁴ Sejak 1970-an Sartono Kartodirdjo memang telah menancapkan tonggak pemikiran sejarah yang revolusioner dengan menerapkan pemakaian ilmu sosial dan pendekatan multidimensional dalam metodologi sejarah. Namun dikarenakan akar intelektualitas sejarawan telah terputus akibat berbagai kepentingan politik, maka kiranya benar apa yang dikatakan Abdullah (2001: 230), pada akhirnya yang menggejala dari pengaruh pemikiran Sartono adalah “orthodoksi sejarah”. Sejarawan justru tergelincir pada sikap “anti sejarah” ketika menganggap bahwa suatu pemikiran adalah ideal dan sudah begitu saja diterima sebagaimana mestinya.

Langkah dekonstruksi sejarah untuk melepaskan beban dari kepentingan politik dan diarahkan untuk lebih intim menyentuh sendi-sendi kehidupan, sudah digulirkan para sejarawan *Annales* di Prancis sejak generasi pertama melalui tren sejarah sosial dan ekonomi. Sejarawan Inggris, John Tosh (2002: 122 - 125), menilik tren pemikiran sejarah *Annales* memiliki kecenderungan memberikan ruang personal dan motif dalam kajian sejarah ekonomi. Salah satu contoh yang disinggung Tosh adalah *business history* sebagai “sejarah ekonomi dari bawah.” Jika sejarawan sudi masuk ke dalam area semacam ini, maka akan didapati banyak pengetahuan yang akan memengaruhi eksplanasi sejarah daripada yang dilakukan biasa-biasa. Hal ini pun akan lebih mumpuni menguji teori-teori ekonomi melalui pengukuran akurat indeks-indeks pertumbuhan. Di sini Tosh mengatakan sejarawan dapat menjadi semacam “pengukur” (*quantifiers*).

Kedudukan sejarawan sebagai pengukur dengan kata lain ini memungkinkan sejarawan untuk mampu menengahkan sejarah sebagai eksplanasi terhadap aspek-aspek yang ditekuni oleh disiplin ilmu lainnya. Sebaliknya, mereka dari disiplin ilmu lain pun memungkinkan mengadaptasikan sejarah sebagai sebuah eksplanasi untuk memahami pola yang terjadi saat ini dan memproyeksikan tren masa akan datang. Dalam hubungannya dengan disiplin ilmu lain, berfungsinya sejarah sebagai sebuah eksplanasi dapat meretas rintangan-rintangan interdisipliner yang telah dipraktikkan dalam pemikiran para sejarawan *Annales* (Tosh, 2002: 125).

2. Sejarah Publik dan Sejarah Interdisipliner

Sejatinya sejarah ditulis bukan menarasikan masa lalu untuk masa lalu itu sendiri; melainkan menarasikan masa lalu untuk menyadarkan masyarakat terhadap keadaan kekinian dan keakanan. Maksud dari sejarah yang “menyadarkan” itu menurut sejarawan Alun Munslow dalam *Deconstructing History* (2001) adalah sejarah yang dapat menanamkan sikap kritis masyarakat untuk terus mempertanyakan kebenaran atas masa lalu. Masyarakat yang kritis, sudah barang tentu akan turut mengontrol kerja dan karya sejarawan. Sebab, kata Stuurman dan Grever (2007): “*historians do not own history. In democratic societies, history is a public concern.*”

Sejak pertama kali digulirkan oleh Robert Kelley di Universitas California, Amerika Serikat, pada 1970-an, istilah “public history” berkembang menjadi disiplin studi sejarah yang diminati praktisi sejarah di berbagai dunia. Di Amerika Serikat dan di beberapa negara di dunia, sejarah publik bahkan telah diakui sebagai profesi di garis terdepan (Cauvin, 2018: 4). Pada 2 Mei 1980 di distrik Columbia didirikan National Council on Public History (NCPH) yang hingga kini masih menjadi organisasi terdepan dalam menjalankan visi misi sejarah publik. Dalam website-nya <https://ncph.org/about/who-we-are/>, dikatakan bahwa: “*NCPH inspires public engagement with the past and serves the needs of practitioners in putting history to work in the world by building community among historians, expanding professional skills and tools, fostering critical reflection on historical practice, and publicly advocating for history and historians.*”

Ketika publik menaruh perhatiannya terhadap sejarah, ini menunjukkan hidupnya pengakuan terhadap kerja dan karya sejarawan. Dalam bekerja dan berkarya, sejarawan pun senantiasa melihat terhadap kebutuhan-kebutuhan publik

dalam memahami permasalahan yang ada di sekelilingnya. Relasi keduanya tepat sebagaimana dikatakan Sayer (2015) bahwa peran dari sejarawan publik adalah untuk mencapai dukungan publik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan ide-ide baru, membentuk kemitraan publik, serta mendapatkan dukungan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan publik. Pada satu sisi dari langkah-langkah itu memungkinkan publik memengaruhi praktik kesejarahan dan pada sisi lain praktik kesejarahan juga dapat memengaruhi kebutuhan dan kebijakan publik (Franklin, 1978).

Dengan demikian, penting bagi praktik masa depan dari sejarah publik yang secara jelas perlu didefinisikan peran dari sejarawan publik agar sedianya ditempatkan dalam kerangka profesional. Ini membutuhkan peran serta dan keterlibatan sejarawan akademis, profesional, dan amatir untuk menjauh dari tradisi yang menganggap sejarah publik sebagai anti kemapanan dengan memfasilitasi penempatan subjek dalam kerangka teori dan metodologis secara menyeluruh. Jika sejarah publik ingin memberikan bukti keberhasilannya dalam mempromosikan dampak sejarah yang lebih luas di luar universitas, maka departemen sejarah di universitas harus membantu proses ini. Metode yang dikembangkan oleh sejarawan publik telah meruntuhkan penghalang antara sejarawan profesional dan publik serta membuat sejarah lebih mudah diakses dan relevan bagi masyarakat luas. Akibatnya, sejarawan publik telah menjadi agen perubahan sosial dan telah memainkan peran dalam bentuk-bentuk baru penciptaan pengetahuan sejarah. Sejarah publik aktif, reaktif, dan relevan pada masa sekarang; dan dengan demikian, masyarakat luas memungkinkan untuk terhubung ke masa lalu, masa kini, dan masa depan (Sayer, 2015).

Sejarah publik membuka peluang besar sejarah hasil penelitian untuk diadaptasikan dalam berbagai keperluan dan kepentingan, termasuk di dalamnya sastra, komik, hingga industri sinema. Raw dan Tutan (2013) memandang sejarah sebagai adaptasi (*history-as-adaptation*) merupakan salah satu agenda dari kajian adaptasi (*adaptation studies*) yang berkembang di Inggris sejak dasawarsa 1980-an. Masa itu disebut dengan kembalinya sejarah dalam pendekatan ilmu humaniora dan sosial setelah sebelumnya pada 1970-an terjadi pemisahan disiplin *cultural history* dari *social history* –mencakup antropologi dan kajian susastra (McDonald, 1996).

Kajian adaptasi telah menjadi disiplin akademik tersendiri yang bertujuan menata kembali kontrol akademik dalam menciptakan pemaknaan sejarah. Permasalahan sejarah menjadi suatu hal yang sentral untuk diadaptasikan dalam berbagai aspek. Tujuan dari adaptasi ini adalah tiada lain untuk menumbuhkan kesadaran sejarah melalui berbagai sarana dan teknologi. Film sejarah adalah contoh genre sejarah sebagai adaptasi yang menunjukkan keterlibatan peran sejarawan sebagai periset atau konsultan agar secara konten film tidak melenceng dari fakta-fakta sejarah. Dalam hal ini kebanyakan dari kalangan awam menganggap bahwa yang dilakukan sejarawan adalah menyampaikan kebenaran dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Namun, sejarawan yang bekerja secara profesional memahami apa yang sejatinya mereka lakukan yaitu mencari bukti-bukti dari masa lalu, lantas menginterpretasikan bukti-bukti yang ada (Leitch, 2015: 10).

Pengakuan terhadap peran sejarawan dalam proses mengembangkan sejarah sebagai adaptasi untuk memenuhi kebutuhan publik tentunya melalui serangkaian upaya strategis. Upaya yang dilakukan dari pengembangan studi sejarah publik adalah dengan menerapkan studi yang bersifat interdisiplin dalam pendidikan sejarah. Hal sentral dari wacana sejarah publik adalah bagaimana menyediakan praktik aktivitas belajar sejarah yang terhubung dengan hasil spesifik pembelajaran seperti berpikir kritis dan studi interdisipliner. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai bukti sejarah secara nyata untuk menunjang buku-buku teks dan pembelajaran di kelas (Sayer, 2015). Maka dari itu, di samping sejarawan profesional, para profesional dari bidang seperti museum, arsip, dan media secara interdisiplin dapat memberi pengaruhnya terhadap konten sejarah publik dan dalam beberapa kasus diundang untuk mengajarkan berbagai modul bidang keilmuannya secara spesifik terhadap pembelajar sejarah. Tantangan ke depan dari sejarah publik adalah mencari mekanisme sejarah publik yang dapat memberikan pengaruh politik dan juga berbagai kebutuhan praktis (Sayer, 2015).

Dalam perkembangan keilmuan sejak dasawarsa 1970-an, kerjasama keilmuan yang bersifat lintas-disiplin (*interdisciplinarity*) antar fakultas dan antarprodi sangat diperlukan dalam menghasilkan berbagai inovasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu perkembangan penting dari studi interdisipliner terjadi pada September 1970 ketika lembaga Center for Educational Research and Innovation of the Organization of the Economic Cooperation and Development (CERI - OECD) mengadakan sebuah konferensi di Nice, Prancis, mengenai tema *interdisciplinarity*. Sebagaimana ditelaah Edward W. Weidner dalam artikelnya *Interdisciplinarity and Higher Education* (1972), konferensi itu diadakan mengingat "*interdisciplinary teaching and research are the key innovation points in universities*". Dari konferensi itu ditarik kesimpulan bahwa studi interdisipliner dapat mengarahkan sejarah dan disiplin ilmu lainnya ke arah kesatuan serta memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara kegiatan profesional dan pendidikan yang diberikan untuk mahasiswa.

Weidner memandang praktik interdisipliner hendaknya dilihat dari perspektif sistem pendidikan secara utuh. Jika disiplin-disiplin ilmu di perguruan tinggi masih mengedepankan ego disiplinernya dengan menutup diri untuk membangun jembatan lintas-disiplin antar fakultas dan antarprodi, maka inovasi seperti dimaksudkan Weidner menjadi sulit terwujud. Keengganan untuk berubah menuju kebaruan akhirnya memunculkan kesan bahwa suatu ilmu pengetahuan seperti sejarah sudah "usang". Terlebih ketika kesan ini dihadapkan pada kebutuhan praktis yang berorientasikan pada nilai-nilai ekonomi, maka anggapan usang itu seolah nyata. Padahal sejarah seharusnya terus berkembang seiring perkembangan zaman. Adapun yang membuatnya menjadi terkesan "usang" bukanlah karena ilmunya, melainkan bagaimana ilmu itu sendiri dikelola secara progresif agar memiliki fungsi aktual dan memberikan manfaat bagi khalayak.

Sejarah tidak akan pernah usang dan akan selalu dibutuhkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dibutuhkan, karena tujuan dari sejarah adalah untuk menumbuhkan kesadaran berbagai pihak bahwa masa lalu akan selalu relevan dan aktual sebagai sarana berefleksi, menguatkan identitas kebangsaan, hingga pijakan mengambil keputusan. Seiring perkembangan zaman, di

berbagai negara (khususnya di Eropa dan Amerika Serikat), berbagai disiplin ilmu seperti pangan, lingkungan, pariwisata, bencana, dan kesehatan melakukan kolaborasi dengan disiplin sejarah. Dari kolaborasi itu berkembang pula studi-studi sejarah baru, sebutlah *food history*, *environmental history*, *tourism history*, *disaster history*, dan *medicine history*. Para pemutus kebijakan menyadari bahwa untuk memahami permasalahan seperti pangan, lingkungan, kesehatan, bencana, dan pariwisata dibutuhkan terlebih dahulu pemahaman historis sebagai rujukan dan pemikiran untuk mengambil keputusan strategis.

Sejarah interdisipliner urgen dikembangkan dalam studi sejarah publik di Indonesia untuk memahami dinamika permasalahan saat ini. Dengan belajar sejarah secara interdisiplin, para calon sejarawan dapat ditempa legalitas pengetahuan dan pengalamannya untuk memiliki keahlian vokasional yang dibutuhkannya untuk merespons kebutuhan dan tantangan zaman.

IV. PENUTUP

Selama ini lulusan dari program studi sejarah selalu surplus. Namun dari status sebagai lulusan tidak banyak dari mereka yang menekuni profesi sejarawan. Kiranya hal ini berkait erat dengan sistem akademik yang tidak mengarahkan dan mengerahkan pembelajaran sejarah pada aspek vokasi untuk berinteraksi dengan publik. Hal itu tampak dari produksi karya-karya akademik meliputi skripsi, tesis, dan disertasi sejarah yang sebagian orientasinya masih menulis sejarah untuk masa lalu. Tidak perlu heran jika publik menganggap sejarah adalah sekadar pelajaran tentang masa lalu. Anggapan ini tentu perlu didekonstruksi untuk meluruskan makna baik sejarah itu sendiri maupun juga sejarawan sebagai profesi yang dibutuhkan berbagai kalangan di tengah kehidupan publik. Sejarah publik yang menekankan pada studi interdisipliner akan mewujudkan keterhubungan sejarah dengan berbagai bidang ilmu. Dengan begini, akan terbentuk berbagai komunitas yang mengakui keahlian sejarawan dalam menyadarkan publik bahwa masa lalu akan selalu relevan sebagai sarana belajar memetakan permasalahan masa kini dan masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (2001). "Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi", dalam Taufik Abdullah. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Anderson, Benedict. (2010). "Public Intellectual or a Tribute to Books", dalam <https://gatholotjo.com/2017/05/08/public-intellectual-or-a-tribute-to-books-by-benedict-anderson/> (diakses 7 April 2020).
- Aoki, Mizuho. (2017). "Japan shouldn't neglect humanities studies in favor of other disciplines: Oxford professor", dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/25/national/japan-shouldnt-neglect-humanities-studies-favor-disciplines-oxford-professor/#.XdhdpdUxXIU> (diakses 1 April 2020).

- Arnold, John H. (2000). *History: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Aoki, Mizuho. (2017). "Japan shouldn't neglect humanities studies in favor of other disciplines: Oxford professor", dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/25/national/japan-shouldnt-neglect-humanities-studies-favor-disciplines-oxford-professor/#.XdhdpdUxXIU> (diakses 1 April 2020).
- Basya, Fahmi. (2012). *Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman*. Jakarta: Ufuk Press.
- Carr. E.H. (2001). *What Is History?* London: Palgrave.
- Cauvin, Thomas. (2018). "The Rise of Public History: An International Perspective", *Historia Crítica* no. 68, hlm. 3-26. doi: <https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01>.
- CNN Indonesia. (2018). "Ridwan Saidi: Mana Buktinya jika Benar ada Kerajaan Sriwijaya", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828111452-20-425309/ridwan-saidi-mana-buktinya-jika-benar-ada-kerajaan-sriwijaya> (diakses 6 April 2020).
- Delacroix, Christian, François Dosse, dan Patrick Garcia. (2003). *Histoire et historiens en France depuis 1945*. Paris : Association pour la diffusion de la pensée française.
- Fulbrook, Mary. (2002). *Historical Theory*. London and New York: Routledge.
- Franklin, John Hope. (1978). "The Historian and Public Policy", *The History Teacher*, vol. 11, No. 3, hlm. 377-391. doi: 10.2307/491628
- Grove, Jack. (2015). "Social sciences and humanities faculties 'to close' in Japan after ministerial intervention", dalam <https://www.timeshighereducation.com/news/social-sciences-and-humanities-faculties-close-japan-after-ministerial-intervention> (diakses 1 April 2020).
- Hartik, Andi. (2016). "Pemerintah akan Sertifikasi Profesi Sejarahwan", dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/09/01/18470061/Pemerintah.Akan.Sertifikasi.Profesi.Sejarahwan> (diakses 1 April 2020).
- Haryono. (1995). *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ihsanudin. (2018). "Jokowi Minta Perguruan Tinggi Hapus Fakultas yang Sudah Usang" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/21343041/jokowi-minta-perguruan-tinggi-hapus-fakultas-yang-sudah-usang> (diakses 1 April 2020).
- Kartodirjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Leitch, Thomas. (2015). "History as Adaptation," dalam Dan Hassler-Forest & Pascal Nicklas. *The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology*. New York: Palgrave Macmillan.
- McDonald, Terrence. (1996). *The Historic Turn in the Human Sciences*. Ann Harbor: University of Michigan Press.
- McRegor, Katharine E. (2008). *Ketika Sejarah Bersejarah: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.
- Munslow, Alun. (1997). *Deconstructing History*. London: Routledge.
- _____. (2000). *The Routledge Companion to Historical Studies*. London: Routledge.
- Nichols, Tom. (2019). *Matinya Kepakaran (The Death of Expertise): Perlawanan terhadap Pengetahuan yang telah Mapan dan Mudaratnya*. Jakarta: KPG.

- Nissani, Moti. (1995). "Fruits, Salads, and Smoothies: A Working definition of Interdisciplinarity", *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de la Pensée Éducative*. 29 (2), hlm. 121–128. doi: <https://doi.org/10.11575/jet.v29i2.52385>
- _____, (1997). "Ten cheers for interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research", *Social Science Journal*, 34 (2), hlm. 201–216. doi: 10.1016/s0362-3319(97)90051-3
- Paul, Herman, "What Defines A Professional Historian? A Historicizing Model", dalam *Journal of Philosophy of History* (2016). doi: 10.1163/18722636-12341322
- Purwanto, Bambang. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Yogyakarta: Ombak.
- Raw, Laurence & Defne Ersin Tutan (eds.). (2013). *The Adaptation of History: Essays on Ways of Telling the Past*. McFarland: Jefferson.
- Sayer, Faye. (2015). *Public History: a Practical Guide*. London: Bloomsbury.
- Savelieva, Irina "'Public History' As A Vocation", Basic Research Program, Working Papers Series: Humanities, National Research University Higher School of Economics (2012-2013). doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2279444>
- Soedjatmoko (ed). (2007). *An Introduction to Indonesian Historiography*. Jakarta: Equinox.
- Stuurman, Siep & Maria Grever. (2007). "Old Canons and New Histories", Maria Grever & Siep Stuurman (ed.). *Beyond the Canon. History for the Twenty-First Century*. London: Palgrave Macmillan.
- Weidner, Edward W. 1973. "Interdisciplinarity and Higher Education", *International Journal of Environmental Studies*, vol. 5. doi: <https://doi.org/10.1080/00207237308709610>
- Wineburg, Sam. (2006). *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Obor.